

## **BAB III**

### **DATA DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Sesuai dengan data yang akan dipergunakan, penelitian ini mengambil data di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

#### **B. Teknik Pengumpul Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan informasi atau data yang bersifat langsung, pada metode ini peneliti mengamati dan mencatat beberapa jenis/objek/kejadian tertentu yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data yang tersedia di kantor BKAD Kabupaten Sleman. Data yang diperoleh yaitu informasi umum mengenai Kabupaten Sleman dan BKAD Kabupaten Sleman. Serta data berupa LRA BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016.

##### **3. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan atau studi literatur yaitu acara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mempelajari, dan

menganalisis beberapa referensi buku atau sumber-sumber tulisan yang berkaitan dengan persoalan analisis kinerja keuangan Pemda.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia atau diperoleh dari sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari pengolahan dan penyajian pihak lain yang menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016.

### **D. Analisis Data**

Teknik analisis yang dipilih penulis adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan rasio terhadap data keuangan yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai teori dalam sumber tertulis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat maupun gambar sehingga dapat memberikan penjelasan kinerja keuangan yang realistis dan sistematis. Adapun analisis yang akan digunakan:

#### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan Pemda dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya. Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). (Halim, 2014: L-5).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1**  
**Kategori Kemandirian Keuangan Daerah**

No	Kategori	Kemandirian	Pola Hubungan
1.	Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
2.	Rendah	25%-50%	Konsultatif
3.	Sedang	50%-75%	Partisipatif
4.	Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2007 (dalam Fitriani, 2014)

- a. Pola hubungan instruktif, dimana campur tangan pemerintah pusat lebih menonjol daripada kemandirian Pemda. Pola hubungan ini dapat dikatakan bahwa daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Pola hubungan konsultatif, dimana Pemda sudah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah, namun masih bergantung pada pemerintah pusat.
- c. Pola hubungan partisipatif, peran Pemda dalam melaksanakan otonomi daerah mendekati mandiri, campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang.

- d. Pola hubungan delegatif, dimana Pemda telah benar-benar dikatakan mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah, dan campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada.

## 2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD mengukur kinerja Pemda dalam merealisasi penerimaan PAD yang telah dirancang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. (Halim, 2014: L-6).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berikut tabel katagori efektivitas PAD.

**Tabel 3.2**  
**Kategori Efektivitas PAD**

No	Kategori	Efektivitas
1.	Tidak Efektif	<60%
2.	Kurang Efektif	60%-80%
3.	Cukup Efektif	80%-90%
4.	Efektif	90%-100%
5.	Sangat Efektif	>100%

Sumber: Mega Pratidina,2013 (dalam Fitriani, 2014)

### 3. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi PAD menunjukkan perbandingan besar belanja yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima. (Halim, 2014: L-7).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Belanja yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

**Tabel 3.3**  
**Kategori Efisiensi PAD**

No	Kategori	Efisiensi
1.	Tidak Efisien	>100%
2.	Kurang Efisien	90%-100%
3.	Cukup Efisien	80%-90%
4.	Efisien	60%-80%
5.	Sangat Efisien	<60%

Sumber: Kepemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Pramono, 2014)

### 4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja bertujuan mengukur tingkat penghematan anggaran oleh Pemda. Rasio ini dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. (Halim dalam Vendra, 2007).

Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3.4**  
**Kategori Efisiensi Belanja**

No	Kategori	Efisiensi
1.	Tidak Efisien	>100%
2.	Kurang Efisien	90%-100%
3.	Cukup Efisien	80%-90%
4.	Efisien	60%-80%
5.	Sangat Efisien	<60%

Sumber: Abdul Halim, 2007 (dalam Vendra, 2015)

5. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan

Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan Pemda dengan estimasi. Salah satu ciri daerah dianggap mempunyai kinerja yang baik yaitu dilihat dari kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan/penerimaan yang melebihi target. Sedangkan apabila realisasi pendapatan/penerimaan belum mencapai target maka kinerja keuangan dinilai kurang baik.

Apabila Pemda memperoleh pendapatan/penerimaan yang melebihi target, hal tersebut merupakan suatu kewajaran dan tidak terlalu mengejutkan. Namun apabila target pendapatan/penerimaan tidak tercapai, maka diperlukan penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Wahyu, 2015).

## 6. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi (DD) menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rumus yang digunakan yaitu:

$$DD = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut tabel kriteria penilaian tingkat derajat desentralisasi.

**Tabel 3.5**  
**Kategori Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi**

No	Derajat Desentralisasi	Kategori
1.	Sangat Baik	>50,00%
2.	Baik	40,01-50,00%
3.	Sedang	30,01-40,00%
4.	Cukup	20,01-30,00%
5.	Kurang	10,01-20,00%
6.	Sangat Kurang	0-10,00 %

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Wahyu, 2015)

## 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total PD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat.

**Tabel 3.6**  
**Kategori Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

No	Kategori	Ketergantungan Keuangan Daerah
1.	Sangat Rendah	0%-10,00%
2.	Rendah	10,01%-20,00%
3.	Sedang	20,01%-30,00%
4.	Cukup	30,01%-40,00%
5.	Tinggi	40,01%-50,00%
6.	Sangat Tinggi	>50,00%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Wahyu, 2015)

#### 8. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Pemda dalam menyelenggarakan otonomi daerah disamping mengandalkan PAD, Pemda dapat menggunakan alternatif sumber dana lain. Sumber dana lain bisa berasal dari pinjaman yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. (Halim, 2014: L-10).

Ketentuan dalam melakukan pinjaman daerah yaitu:

- a. Jumlah Kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
- b. DSCR minimal 2,5.
- c. Pinjaman lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

Rumus yang digunakan yaitu:



$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

## Keterangan:

- DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan lainnya
- DAU = Dana Alokasi Umum
- BW = Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemda. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.
- Pokok Angsuran = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun angsuran yang bersangkutan
- Bunga = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

Biaya Lainnya = Biaya lainnya (biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, denda)

#### 9. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menggambarkan kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. (Halim, 2012: L-12).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)